

INTEGRASI KONSEP KEPERCAYAAN, MODEL UTAUT DAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* DALAM MODEL EVALUASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)

Adhi Cahyadi¹, Hanung Adi Nugroho², Wing Wahyu Winarno³
^{1,2,3}Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email: ¹adhi.cio14@mail.ugm.ac.id, ²adinugroho@ugm.ac.id, ³wing@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Aplikasi SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengevaluasi kepercayaan pengguna terhadap penerimaan dan penggunaan aplikasi SIPKD diperlukan model penelitian yang tepat. Penelitian ini mengusulkan model evaluasi sistem informasi dari model penerimaan UTAUT yang telah dimodifikasi dengan menyertakan variabel kepercayaan di dalamnya. Konsep Informasi dan Komunikasi dalam kerangka Enterprise Risk Management turut menjadi dasar dalam penambahan variabel kepercayaan tersebut.

Kata Kunci: SIPKD, Kepercayaan, UTAUT, ERM

1. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi (TI) memiliki dampak langsung dalam era keterbukaan informasi. Bagi pemerintah/pemerintah daerah selaku perumus dan pelaksana kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), keterbukaan informasi diwujudkan dalam transparansi pengelolaan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Pemerintah/pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan yang komprehensif bagi masyarakat luas, termasuk informasi keuangan yang memadai dengan memanfaatkan kemajuan TI guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. TI menjadi faktor strategis dalam pencapaian tujuan suatu organisasi sehingga mendorong organisasi untuk membangun dan menerapkan tata kelola TI secara efektif [1].

Peran penting TI dalam proses bisnis suatu organisasi telah menjadi perhatian pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemerintah telah mengembangkan *E-government*, dengan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan TI yang dimaksud mencakup dua aktivitas yaitu (a) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan TI agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Salah satu strategi pengembangan *E-government* yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan TI secara optimal. Infrastruktur dan aplikasi TI berfungsi sebagai penyediaan sarana dan fasilitas dalam penyajian pelayanan ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, mudah, dan handal [2].

Pemerintah telah mengembangkan aplikasi TI untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dikembangkan guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik. SIPKD dibangun oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel [3].

Kepercayaan diperlukan oleh pengguna suatu teknologi sistem informasi agar pengguna merasakan bahwa teknologi sistem informasi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Goodhue dalam Jumaili [4] mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk dijadikan acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Dalam model ini dinyatakan bahwa pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang tinggi (positif) tidak hanya dikarenakan oleh karakteristik sistem yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai dengan kebutuhan tugas mereka.

Evaluasi penerimaan dan penggunaan sistem informasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model penelitian, diantaranya *The Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behaviour* (TPB), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Extension of The Technology Acceptance Model* (TAM2), *Diffusion of Innovation Model* (DOI) dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Dalam penyusunan model penelitian ini, peneliti menggunakan model penerimaan dan penggunaan UTAUT karena penilaian dengan menggunakan model ini lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70 persen varian pengguna [5].

Dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), suatu aplikasi sistem informasi dapat digunakan sebagai salah satu alat manajemen resiko. Proses bisnis suatu organisasi pemerintahan yang memanfaatkan TI, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, tidak terlepas dari potensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Diperlukan analisis yang mendalam untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik sehingga data-data keuangan yang ada dapat diolah untuk menghasilkan informasi keuangan yang valid.

Untuk menilai kepercayaan pengguna dalam penerimaan dan penggunaan SIPKD, dan menganalisis keterkaitan informasi dan komunikasi dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), perlu dirancang sebuah model penelitian yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model evaluasi sistem informasi dari model penerimaan UTAUT yang telah dimodifikasi dengan menyertakan variabel kepercayaan di dalamnya. Konsep informasi dan komunikasi dalam ERM turut menjadi dasar untuk menganalisis suatu aplikasi sistem informasi dalam mendukung proses bisnis suatu organisasi pemerintahan.

2. METODE

Untuk merancang model evaluasi penerimaan dan penggunaan teknologi dengan mengintegrasikan faktor kepercayaan didalamnya, berikut tahap-tahap yang dilakukan:

- 1) Tinjauan umum terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti penerimaan dan penggunaan aplikasi SIPKD.
- 2) Tinjauan umum terhadap model evaluasi yang ada untuk memberikan landasan teori terhadap perancangan kerangka dan variabel model penelitian SIPKD.
- 3) Menganalisis kerangka model evaluasi dan mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan model sebagai bahan pertimbangan dalam mengusulkan model evaluasi yang baru.

Penjelasan lebih lanjut dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tinjauan umum terhadap penelitian sebelumnya
Penelitian terhadap SIPKD sebelumnya telah beberapa kali dilakukan, diantaranya Pirade *et. al.* [6] yang mengevaluasi pengaruh penggunaan SIPKD terhadap kinerja pegawai di Kabupaten Tana Toraja. Dewi dan Mimba [7] yang mengevaluasi pengaruh efektivitas penerapan SIPKD pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian atas penerimaan dan penggunaan SIPKD yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan model penerimaan dan penggunaan UTAUT diantaranya Mahendra dan Affandy [8] yang mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan SIPKD pada Pemerintah Kota Blitar. Iriani *et. al.* [9] yang menguji SIPKD berbasis *web* di Kabupaten Pacitan.

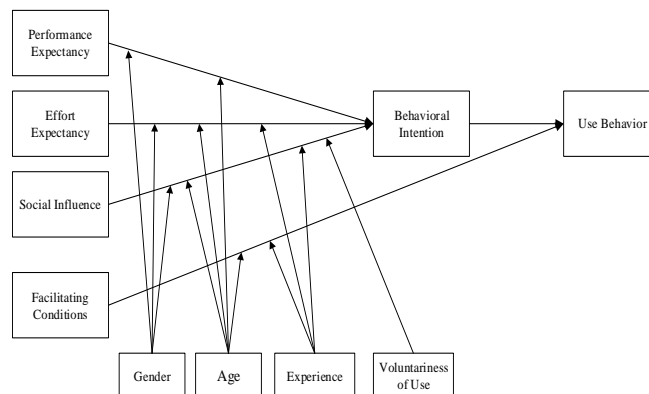
Belanche *et. al.* [10] mengevaluasi penerimaan teknologi aplikasi sistem informasi milik pemerintah Spanyol dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan mengintegrasikan kepercayaan (*trust*) dan nilai-nilai personal (*personal values*).

- 2) Landasan teori terhadap perancangan kerangka dan variabel model penelitian SIPKD
Penelitian ini membahas tiga teori yang relevan dengan usulan kerangka model penelitian, yaitu model penerimaan UTAUT, konsep kepercayaan (*trust*), dan konsep informasi dan komunikasi dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM). Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.
 - a) *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)
Model UTAUT merupakan teori yang berpengaruh dan banyak diadopsi untuk melakukan penelitian penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap suatu teknologi informasi. UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh, *et. al.* [5] menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Motivational Model* (MM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Combined TAM*

and TPB (C-TAM-TPB), *Model of PC Utilization* (MPCU), *Innovation Diffusion Theory* (IDT) dan *Social Cognitive Theory* (SCT).

UTAUT berasumsi bahwa kepercayaan tentang manfaat kegunaan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor penentu adopsi teknologi informasi yang utama dalam sebuah organisasi. Dalam UTAUT terdapat faktor-faktor penentu yang bertindak sebagai dasar bagi sikap terhadap penggunaan sistem tertentu, yang pada akhirnya akan menentukan niat menggunakan dan kemudian menghasilkan perilaku pemakaian yang nyata. Selain itu, model UTAUT mencoba menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan individual penggunaan teknologi. Lebih khusus lagi, hubungan antara ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan dan intensitas penggunaan dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin dan pengalaman. Model UTAUT dipandang menggunakan 70% varian yang lebih baik dibandingkan yang digunakan oleh TAM.

1. Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*)
Didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai keuntungan kinerja dalam pekerjaannya.
2. Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*)
Didefinisikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem.
3. Pengaruh Sosial (*Social Influence*)
Didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang merasakan bahwa orang-orang yang dianggapnya penting, percaya bahwa ia seharusnya menggunakan sistem yang baru.
4. Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*)
Didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang meyakini bahwa infrastruktur organisasi dan teknis yang ada mendukung penggunaan sistem. Model UTAUT dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model UTAUT.

b) Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan (*trust*) adalah harapan positif suatu pihak yang berasal dari pihak lain yang memiliki pengaruh baik positif maupun negatif [11]. Konsep hubungan kepercayaan dalam konteks komunikasi dituangkan dalam sebuah eksposisi oleh Gerck [12]. Lebih khusus, dalam konteks rekayasa komunikasi internet. Menurutnya, kepercayaan dianggap sebagai sesuatu yang pada dasarnya menular, tetapi dengan aturan khusus untuk komunikasi. Eksposisi Gerck juga membahas induksi komunikasi kepercayaan dalam lingkungan yang heterogen, dari manusia ke mesin, mesin ke mesin, dan mesin ke manusia.

Kepercayaan (*trust*) dalam konteks lingkungan pemerintahan erat kaitannya dengan implementasi *e-government*. Dalam lingkungan pemerintahan, baik lingkungan internal suatu instansi maupun dalam hubungannya dengan instansi lainnya, *e-government* memiliki peran lebih dari sekedar penghubung yang menggunakan seperangkat komputer. *E-government* turut berperan dalam mendesain ulang cara kerja pemerintah dan cara pegawai bekerja sama dan menunjukkan kinerjanya [13]. Menurut Papadopolou *et. al.* [14], *trust* dalam konteks *e-government* dapat dikonseptualisasikan dan diarahkan pada beberapa kelompok yaitu:

- a. Kepercayaan terhadap data yang tersimpan (*trust in stored data*)
- b. Kepercayaan terhadap pelayanan (*trust in service*)
- c. Kepercayaan terhadap informasi (*trust in information*)
- d. Kepercayaan terhadap sistem atau infrastruktur (*trust in system*)
- e. Kepercayaan terhadap transaksi (*trust in transaction*)

- f. Kepercayaan terhadap organisasi pemerintah (*trust in government organization*)
 - g. Kepercayaan terhadap sistem institusional (*institution-based trust*).
- c) Informasi dan Komunikasi dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM)
Pentingnya validitas data dan kehandalan suatu sistem informasi menjadi perhatian penting dalam proses pengujian sistem pengendalian internal dengan menggunakan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM). ERM dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). ERM merupakan proses untuk mengelola resiko-resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. ERM terdiri dari delapan komponen yang saling terkait yaitu lingkungan internal (*internal environment*), penetapan tujuan (*objective setting*), identifikasi kejadian (*event identification*), penilaian resiko (*risk assessment*), respon resiko (*risk response*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*). Kerangka ERM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) [15].

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan komponen informasi dan komunikasi dalam kerangka ERM untuk menganalisis validitas informasi dan kehandalan sistem informasi dalam proses bisnis organisasi pemerintahan, khususnya proses pengolahan data-data keuangan. Validitas informasi dan kehandalan sistem informasi dalam suatu proses bisnis sangat penting, karena hal ini mampu menggambarkan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi, khususnya terkait pengelolaan data-data keuangan, berjalan dengan baik.

Manajemen resiko dapat dilakukan dengan menggabungkan pemanfaatan teknologi informasi dengan metode manajemen resiko [16]. Disamping itu, penerapan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses informasi [17]. Salah satu tantangan dalam proses pemerintahan adalah tidak mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Desain dan implementasi proses tata kelola harus memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan mampu memberikan gambaran bagi organisasi [17].

ERM dapat menjadi salah satu metode untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan negara/daerah berjalan dengan baik. Pengguna SIPKD harus memastikan bahwa data-data keuangan yang akan diinput ke dalam sistem merupakan data yang valid, untuk kemudian diproses menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel.

- 3) Analisis dan identifikasi kekuatan dan keterbatasan kerangka model evaluasi
Hasil analisis dan identifikasi kekuatan dan keterbatasan kerangka model evaluasi adalah sebagai berikut.

Model penerimaan UTAUT dapat digunakan untuk mengevaluasi penerimaan dan penggunaan pengguna SIPKD. Meskipun ada beberapa model evaluasi penerimaan teknologi, namun evaluasi dengan menggunakan model ini lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70 persen varian pengguna [5].

Model penelitian yang diusulkan menghilangkan variabel moderat karena pada beberapa penelitian, variabel moderat pada model UTAUT terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi. Variabel penggunaan secara sukarela (*voluntariness of use*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sistem yang bersifat dipaksakan (*mandatory*) [18]. Variabel usia (*age*) dan jenis kelamin (*gender*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi [19]. Variabel pengalaman (*experience*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi [20].

Kepercayaan (*trust*) dalam konteks *e-government* mengacu pada penelitian Papadopoulou *et. al.* [14]. Relevansi variabel kepercayaan dalam konteks *e-government* menurut Barua [13] dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel kepercayaan (*trust*)

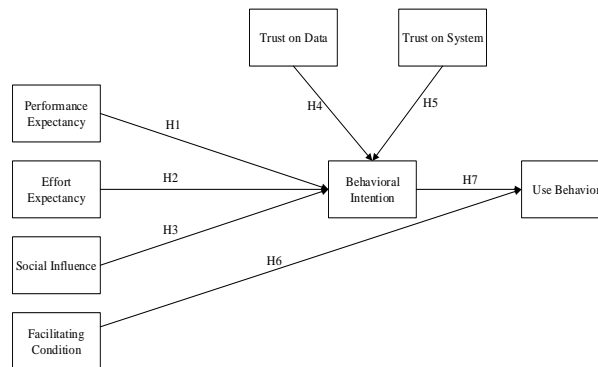
Jenis <i>Trust</i>	Ruang Lingkup	Relevansi dalam G2G
<i>Trust in Stored Data</i>	<i>Trust</i> dalam manajemen penyimpanan data pemerintah	Variabel ini relevan untuk pegawai pemerintah. Data keuangan pemerintah sangat penting dan dapat dipahami oleh seluruh pegawai terkait
<i>Trust in Service</i>	<i>Trust</i> dalam konteks pelayanan pemerintah	Pegawai pemerintah adalah penyedia layanan bagi masyarakat, bukan menerima pelayanan. Jadi, variabel ini tidak tepat
<i>Trust in Information</i>	<i>Trust</i> dalam konteks informasi yang disediakan pemerintah	Pegawai pemerintah menyediakan informasi dan tidak menerima informasi. Pegawai pemerintah hanya menerima instruksi dan keputusan berada pada otoritas yang lebih tinggi. Variabel ini dinilai tidak tepat
<i>Trust in System</i>	<i>Trust</i> dalam sistem/infrastruktur pemerintah	<i>Trust on application system</i> dan infrastruktur pendukung seperti komputer, LAN, SWAN, dll memiliki dampak positif dalam adopsi pegawai
<i>Trust in Transaction</i>	<i>Trust</i> dalam transaksi pemerintah	Pertanyaan tentang <i>trust in transaction</i> muncul diantara-nya ketika masyarakat menggunakan sistem <i>website online</i> milik pemerintah
<i>Trust in government organization</i>	<i>Trust</i> dalam organisasi pemerintahan (dari kantor pusat sampai dengan satuan kerja terkecil)	Pemerintah terdiri atas para pegawai. Pegawai tidak diminta untuk mengembangkan <i>trust</i> pada organisasi mereka
<i>Institution based Trust</i>	<i>Trust</i> dalam sistem institusional pendukung pemerintah	<i>Trust</i> difokuskan pada <i>trust on legal, regulatory framework</i> dan standar-standar pemerintah. Ini tidak relevan bagi pegawai pemerintah. Hanya relevan bagi masyarakat

Kerangka ERM mensyaratkan validitas informasi dan kehandalan sistem informasi, karena hal ini menggambarkan sistem pengendalian internal, khususnya terkait pengelolaan data-data keuangan, berjalan dengan baik. Dengan memastikan keakuratan data-data sebelum diinput ke dalam SIPKD, maka akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Informasi yang dihasilkan dikomunikasikan secara terus menerus kepada pihak yang saling terkait. Dalam SIPKD, informasi keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang terintegrasi, dikomunikasikan oleh pengguna SIPKD kepada pihak-pihak terkait seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Dari Tabel 1 di atas, dan dengan mempertimbangkan kerangka informasi dan komunikasi dalam ERM, peneliti mempertimbangkan untuk menempatkan dua variabel kepercayaan dalam model evaluasi yaitu kepercayaan terhadap data yang tersimpan (*trust in stored data*) dan kepercayaan terhadap sistem (*trust in system*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Kepercayaan dalam Model Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan SIPKD
 Model evaluasi mengacu pada integrasi model UTAUT dan variabel kepercayaan hasil penelitian Papadopoulou *et al.* [15]. Model penelitian yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Model penelitian.

Model yang diusulkan merupakan modifikasi model penerimaan UTAUT dengan menghilangkan variabel moderat dan menambahkan variabel kepercayaan terhadap data yang tersimpan (*trust in stored data*) dan kepercayaan terhadap sistem (*trust in system*).

2) Hipotesis

Model evaluasi ini akan menguji tujuh hipotesis dengan mengacu pada hasil penelitian Venkatesh *et. al.* [5] dan Papadopoulou *et. al.*[14], ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hipotesis

Kode	Hipotesis
H1	<i>Performance Expectancy</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Behavioral Intention</i>
H2	<i>Effort Expectancy</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Behavioral Intention</i>
H3	<i>Social Influence</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Behavioral Intention</i>
H4	<i>Trust on Data</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Behavioral Intention</i>
H5	<i>Trust on System</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Behavioral Intention</i>
H6	<i>Facilitating Conditions</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>UseBehavioral</i>
H7	<i>Behavioral Intention</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Use Behavioral</i>

Hipotesis tersebut diusulkan setelah melakukan kajian ilmiah sesuai metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan SIPKD. Hipotesis juga telah disesuaikan dengan karakteristik lingkup pemerintahan.

Model evaluasi ini diteliti dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden, yaitu para pengguna SIPKD. Jawaban responden nantinya akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang terdapat di dalam model penelitian.

4. SIMPULAN

Model yang diusulkan merupakan model integrasi dari model penerimaan UTAUT dan variabel kepercayaan. Variabel dalam kerangka model evaluasi ini disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi dalam ruang lingkup pemerintahan terkait dengan penerimaan dan penggunaan suatu sistem informasi.

Melalui tahapan-tahapan ini, ditunjukkan bahwa model evaluasi penerimaan dan penggunaan SIPKD dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi, termasuk variabel kepercayaan didalamnya. Tahap selanjutnya, untuk memvalidasi model penelitian ini, dapat dilakukan dengan melakukan pengujian secara kuantitatif dengan menggunakan model ini pada instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi SIPKD.

5. REFERENSI

[1] Ali, S. dan Green, P. 2005. *Determinants of Effective Information Technology Governance: A Study of IT Intensity*. Proc Int IT Governance, Auckland, New Zeal.
 [2] Ariyani, P. F. 2013. Kajian Kerangka Kerja Peningkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya;10(1).
 [3] _____. 2015. *Seputar Implementasi SIPKD*.(Online), (<http://www.usadi.co.id/headline.php>, diakses 30 September 2015).

- [4] Jumaili, S. 2005. Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual. (September):15–6.
- [5] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., dan Davis, F. D. 2003. *User Acceptance of Information Technology* : Toward a Unified View. *MIS Quarterly*; 27(3).
- [6] Pirade, D., Saleh, A. K., dan Amar, M. Y. 2013. Pengaruh Penggunaan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Kabupaten Tana Toraja.
- [7] Dewi, P. A. R., Putu, N., dan Harta, S. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan;3:442–57.
- [8] Aldillah, R., Mahendra, dan Didied, P. A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar. *J Ilm Mhs FEB Unibra*. 2013 Feb 1; 32(1):54–5.
- [9] Iriani, S., Suyanto, M., dan Amborowati, A. 2014. Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT). *Indones J Netw Secur*; 3(2):60–6.
- [10] Elanche, D., Casaló, L. V., dan Flavián, C. 2012. Integrating Trust and Personal Values into the Technology Acceptance Model: The Case of e-Government Services Adoption. *Cuad Econ y Dir la Empres [Internet]*. ACEDE. 15(4):192–204.(Online), (<http://dx.doi.org/10.1016/j.cede.2012.04.004>, diakses pada tanggal 22 Februari 2015).
- [11] Mollering, G. 2005. The Trust/Control Duality: An Integrative Perspective on Positive Expectations of Others. *Int Sociol [Internet]*. Sep 1;20(3):283–305.(Online), (<http://iss.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0268580905055478>, diakses pada 23 Februari 2015)
- [12] Gerck, E. 2002. Trust as Qualified Reliance on Information.
- [13] Barua, M. 2012. E-Governance Adoption in Government Organization of India. *Int J Manag Public Sect Inf Commun Technol [Internet]*. 2012 Sep 30;3(1): 1–20.(Online), (<http://www.airccse.org/journal/mpict/papers/3112ijmpict01.pdf>, diakses pada 10 September 2015).
- [14] Papadopoulou, P., Nikolaidou, M., dan Martakos, D. 2010. What Is Trust in E-Government? A Proposed Typology. *43rd Hawaii Int Conf Syst Sci [Internet]*. Ieee; 2010;1–10.(Online), (<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5428288>, diakses 5 Oktober 2015).
- [15] COSO. 2004. Enterprise Risk Management-Integrated Framework: Application Techniques.
- [16] Li, L. 2013. Study on The Application of Information Technology in Enterprise Risk Management. *Int Conf Qual Reliab Risk, Maintenance, Saf Eng*.
- [17] PricewaterhouseCoopers. 2013. Governance, Risk Management and Compliance: Sustainability and Integration Supported by Technology.
- [18] Seymour, L., Makanya, W., dan Berrangé S. 2007. End-Users Acceptance of Enterprise Resource Planning Systems : An Investigation of Antecedents.
- [19] Christiono, A. T. dan Tambotoh, J. J. C. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Menggunakan Pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. 2(Utaut 2):1–7.
- [20] Akbar, F. 2013. What Affects Students' Acceptance and Use of Technology? [Internet]. Carnegie Mellon University.(Online), (<http://repository.cmu.edu/hsshonors>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015).

